



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa tantangan yang menghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam peningkatan Kinerja Pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Perhubungan
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Sedangkan peluang pengembangan Pelayanan OPD didasarkan pada hasil analisis terhadap Renstra K/L, Renstra OPD Provinsi dan Renstra OPD Kabupaten yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan dalam waktu lima tahun dapat diuraikan secara terinci dalam tabel tabel berikut :

Tabel 2.13
Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Dinas Perhubungan
Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi Dan Renstra Kementerian/Lembaga

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	1. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
	2. Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut		Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> dan <i>bottleneck</i> kapasitas infrastruktur transportasi;
			Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi sesuai target <i>demand transport</i>	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
			Meningkatkan standar kelaikan operasional sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.
			Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan yang baik (Clean Governance) Meningkatkan pemberdayaan angkutan umum	

Tantangan dan peluang pada lima tahun dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas perhubungan juga dipengaruhi oleh rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Wilayah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Klungkung, tabel berikut mengemukakan Hasil telaahannya.

Tabel 2.14
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana ruas jalan menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan diusulkan sebagai jalan K2	Belum tersedia	Program Peningkatan pelayanan angkutan laut dan penyeberangan	Pemenuhan kebutuhan akses jalan menuju Dermaga Gunaksa	Gunaksa Klungkung
2	Peningkatan kualitas pelayanan Terminal Kota Semarapura (Terminal Klungkung)	Telah Tersedia	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Pelayanan Terminal semakin meningkat	Terminal Galiran Semarapura
3	Pengembangan Terminal Tipe C (Banjarangkan, Dawan dan Sampalan Nusa Penida)	Belum Tersedia	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana darat	Banjarangkan, Dawan dan Sampalan Nusa Penida



Tabel 2.15
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan jalur hijau, 1 (satu) blok lokasi di sepanjang jalur jalan Tojan – Pantai Watuklotok;	Belum Tersedia	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rencana pembangunan Tempat pengujian kendaraan bermotor di jalur jalan Tojan-Pantai Watuklotok	Jalan Watu Klotok-Tojan

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”. tabel 6 mengemukakan Hasil analisa kebijakan pelayanan OPD terhadap dokumen KLHS Kabupaten Klungkung.

Tabel 2.16
Hasil Analisa Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Klungkung
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.	Pelayanan uji kendaraan berperan penting, pengawasan emisi gas buang kendaraan perlu ditingkatkan.	Penambahan jumlah tenaga penguji dan penambahan alat uji secara mekanis
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu	Transportasi umum Belum dikelola dengan baik, animo masyarakat menggunakan moda transportasi umum rendah, penataan	Peningkatan pengelolaan dan penertiban transportasi umum, penataan terminal dengan baik.



No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
			terminal perlu diperbaiki.	
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Suatu kegiatan atau usaha “wajib” dilengkapi dengan Dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL–UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).	Diterapkannya AMDAL atau UKL–UPL dalam pembangunan Dermaga Gunaksa dan Pembangunan Dermaga Segitiga Emas	Penerapan Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada lingkungan
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Sumber daya alam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu: sumber daya takterbarukan (non-renewable) atau dapat habis (exhaustable, depletable) dan sumber daya terbarukan (renewable). Pemanfaatan sumber daya alam agar dilakukan secara efektif efisien.	Pelaksanaan efisiensi dalam pemakaian BBM, Sumberdaya air dan listrik dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD	Agar selalu menerapkan efisiensi dalam pemakaian sumber daya alam khususnya BBM, air dan listrik dalam kegiatan OPD
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan pada iklim yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga terhadap variabilitas iklim alami yang diamati selama periode waktu tertentu. Masalah Perubahan iklim sulit diselesaikan secara regional dari pada secara global, sehingga permasalahan ini harus diantisipasi secara global dengan memperhatikan isu-isu global yang ada.	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan oleh pemakaian Bahan bakar fosil salah satunya dari emisi gas buang kendaraan bermotor, oleh karena itu Pengujian kendaraan bermotor perlu di perhatikan.	Pengujian kendaraan bermotor salah satunya pengujian emisi gas buang kendaraan perlu diperhatikan dan ditingkatkan.
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk	Pelaksanaan pelayanan di Terminal, Pelabuhan tradisional dan pelabuhan	Menjaga potensi keanekaragaman hayati dengan menjaga kebersihan dan pelestarian



No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
		di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta komplek-komplek Ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem.	penyeberangan kapal ro-ro agar tetap menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar	lingkungan di tempat-tempat pelayanan OPD diantaranya di pelabuhan penyeberangan.

2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD berdasarkan Analisa SWOT

2.4.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perhubungan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan di wilayah Kabupaten Klungkung dalam mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur



- sebagaimana program Pemerintah Kabupaten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan. Pelayanan sektor perhubungan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan baik melalui APBD maupun APBN.
 4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

2.4.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan Segitiga Emas;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan.

**b. Ancaman (Treath)**

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Disiplin pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
3. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
4. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
5. Belum memadainya pelayanan angkutan laut antar pulau, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;
6. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

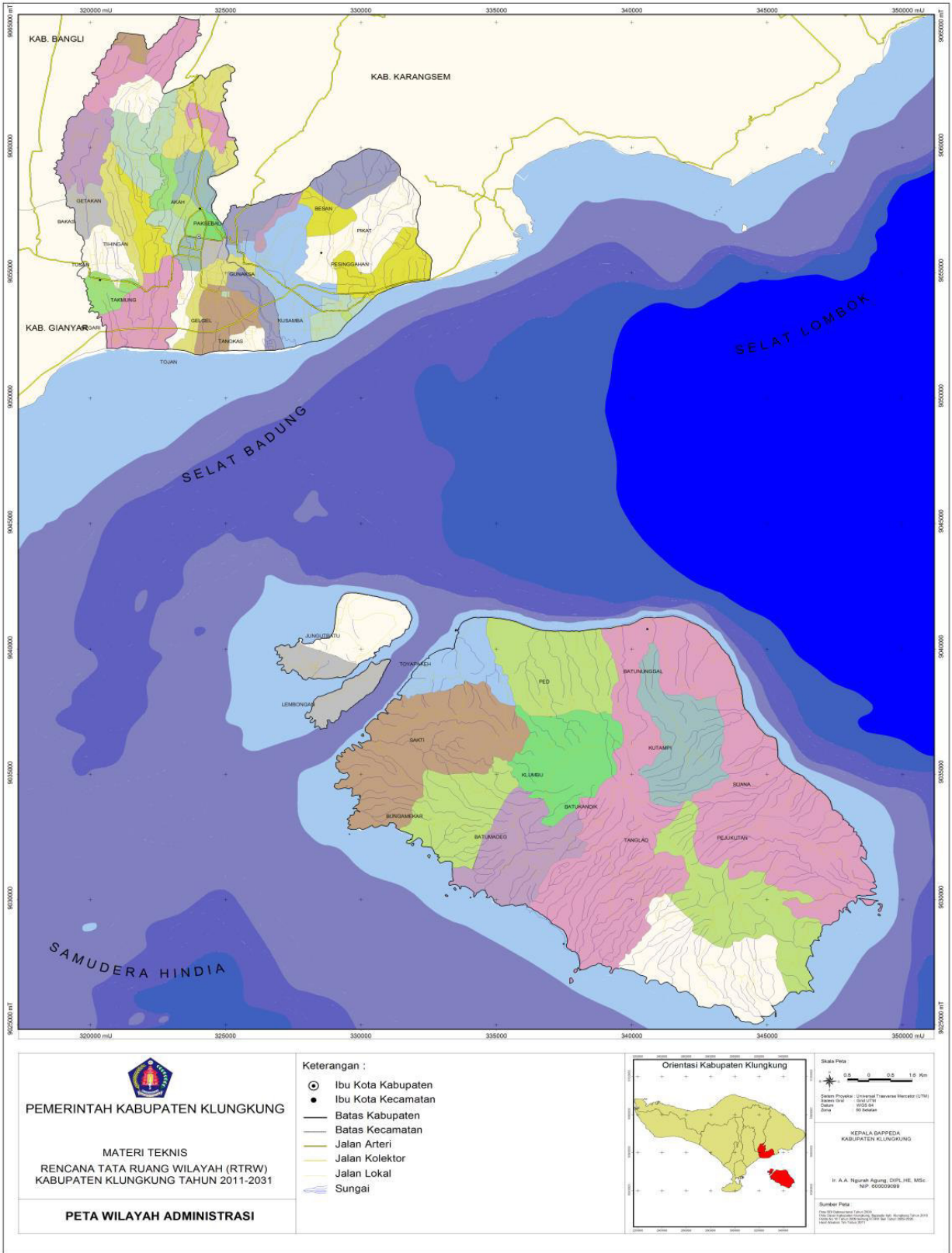
Kabupaten Klungkung terletak diantara 115⁰ 21’ 28” – 115⁰ 37’ 43” Bujur Timur dan 80⁰ 27’ 37” – 80⁰ 49’ 00” Lintang Selatan dengan batas-batas di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem sebelah Selatan Samudra India dan sebelah Barat Kabupaten Gianyar. Luas wilayah Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kodya Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali dengan luas wilayah 31.500 Ha. (315 km²) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Luas Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya terletak di Kepulauan Nusa Penida (20.284 Ha). Memiliki panjang pantai sekitar 97,6 km yang membentang di Klungkung daratan sepanjang 14,10 km dan di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 83,50 km.

Pusat Kota Kabupaten Klungkung yaitu Semarapura terletak di tengah-tengah P. Bali, sehingga sangat mudah dijangkau dari Kabupaten/Kota se-Bali. Pusat Kota Semarapura terdekat berjarak sekitar 12 Km dan terjauh 120 Km dari pusat Kota Kabupaten se Bali adapun rinciannya seperti dibawah ini :

Tabel 3.1
Jarak dan waktu tempuh
dari Kota Semarapura ke kota lainnya di Bali

NO	Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota se-Bali	Jarak (Km)	Jarak Tempuh (Menit)
1	Gianyar	12,0	10
2	Bangli	34,9	39
3	Denpasar	28,8	34
4	Amlapura	39,2	46
5	Singaraja (via Bedugul)	93,1	113
6	Singaraja (via Kintamani)	89,7	95
7	Negara	120,0	133

Sumber : Bappeda Kabupaten Klungkung



Gambar 3.1.
Peta Wilayah Kabupaten Klungkung



Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan OPD)	(Di luar kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
1 Gambaran Pelayanan OPD	Tugas pokok Dishub Kab. Klungkung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No: 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM bidang Perhubungan	1. Personil yang dimiliki 2. Sarana dan prasarana yang ada 3. Situasi dan lingkungan kerja yang kondusif 4. Penerapan IPTEK 5. Dukungan Stakeholders terkait	1. Peraturan perundang-undangan 2. Potensi wilayah daerah 3. Sumber dana pemerintah dan masyarakat 4. Tuntutan masyarakat 5. Partisipasi masyarakat	1. Sumber daya manusia masih kurang memadai 2. Sarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi 3. Pemahaman terhadap Tugas Pokok Fungsi masih rendah 4. Aktivitas dan kreativitas personil masih kurang 5. Koordinasi masih kurang
2 Kajian Terhadap Renstra OPD Provinsi	Belum optimalnya sarana dan prasarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. 3. Pemerintah Daerah	1. Personil yang dimiliki 2. Sarana dan prasarana yang ada 3. Situasi dan lingkungan kerja yang kondusif 4. Penerapan IPTEK 5. Dukungan Stakeholders terkait	1. Peraturan perundang-undangan 2. Potensi wilayah daerah 3. Sumber dana pemerintah dan masyarakat 4. Tuntutan masyarakat 5. Partisipasi masyarakat	1. Sumber daya manusia masih kurang memadai 2. Sarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi 3. Pemahaman terhadap Tugas Pokok Fungsi masih rendah 4. Aktivitas dan kreativitas personil masih rendah 5. Koordinasi masih kurang
3 Kajian Terhadap Renstra Kementerian Perhubungan	1. Pelaksanaan kegiatan untuk keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi 3. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi	1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang SPM bidang Perhubungan 2. RENSTRA KEMENHUB	1. Personil yang dimiliki 2. Sarana dan prasarana yang ada 3. Situasi dan lingkungan kerja yang kondusif 4. Penerapan IPTEK 5. Dukungan Stakeholders terkait	1. Peraturan perundang-undangan 2. Potensi wilayah daerah 3. Sumber dana pemerintah dan masyarakat 4. Tuntutan masyarakat 5. Partisipasi masyarakat	1. Sumber daya manusia masih kurang memadai 2. Sarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi 3. Pemahaman terhadap Tugas Pokok Fungsi masih rendah 4. Aktivitas dan kreativitas personil masih kurang 5. Koordinasi masih kurang
4 Kajian Terhadap RTRW	1. Rencana ruas jalan menuju ke Pelabuhan penyeberangan Klungkung Daratan diusulkan sebagai jalan K2 2. Peningkatan kualitas pelayanan Terminal Kota Semarapura (Terminal Klungkung) 3. Pengembangan Terminal Tipe C (Banjarangkan, Dawan dan Sampalan Nusa Penida)	1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033	1. Personil yang dimiliki (SDM) 2. Sarana dan prasarana yang ada 3. Situasi dan lingkungan kerja yang kondusif 4. Penerapan IPTEK 5. Dukungan Stakeholders terkait	1. Peraturan perundang-undangan 2. Potensi wilayah daerah 3. Sumber dana pemerintah dan masyarakat 4. Tuntutan masyarakat 5. Partisipasi masyarakat	1. Sumber daya manusia masih kurang memadai 2. Sarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi 3. Pemahaman terhadap Tugas Pokok Fungsi masih rendah 4. Aktivitas dan kreativitas personil masih kurang 5. Koordinasi masih kurang
6 Kajian Terhadap KLHS	1. Terminal kota tidak berfungsi optimal 2. Terbatasnya jumlah tenaga sertifikasi pengujian kendaraan bermotor berpengaruh pada pencemaran udara karena emisi gas buang. 3. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah kawasan budaya dan wisata serta sentra industri	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023	1. Personil yang dimiliki (SDM) 2. Sarana dan prasarana yang ada 3. Situasi dan lingkungan kerja yang kondusif 4. Penerapan IPTEK 5. Dukungan Stakeholders terkait	1. Peraturan perundang-undangan 2. Potensi wilayah daerah 3. Sumber dana pemerintah dan masyarakat 4. Tuntutan masyarakat 5. Partisipasi masyarakat	1. Sumber daya manusia masih kurang memadai 2. Sarana yang ada belum memenuhi tuntutan aktivitas fungsi 3. Pemahaman terhadap Tugas Pokok Fungsi masih rendah 4. Aktivitas dan kreativitas personil masih kurang 5. Koordinasi masih kurang



Berdasarkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD terdapat Permasalahan pokok yang dapat dijabarkan kembali sampai pada akar masalah yang dihadapi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Uraian Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.	Belum optimalnya pelayanan sekretariat dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
			Belum optimalnya kompetensi dan tingkat disiplin SDM
			Belum optimalnya Pengelolaan Kearsipan sesuai dengan standar
			Belum optimalnya Kualitas perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas .
			Belum optimalnya Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan sesuai standar yang ditetapkan.
			Belum optimalnya Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan asset
		Belum Optimalnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Belum tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku
			Belum Optimalnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Belum optimalnya Pengoperasian Prasarana Perhubungan
			Belum optimalnya operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida
			Belum optimalnya prasarana dan fasilitas Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai dengan standar yang berlak
		Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Umum Darat dan Laut	Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Laut
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
			Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Darat
		Belum Optimalnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	Belum Optimalnya Pemenuhan pengaturan dan pengawasan Lalu-lintas
			Belum Optimalnya pemantauan dan pengawasan terhadap analisa dampak Lalu-lintas
			Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan Fasilitas Lalu-lintas
		Belum Optimalnya Pengembangan dan Keselamatan Transportasi Perhubungan	Belum optimalnya pengembangan teknologi Perhubungan
			Belum Optimalnya penyusunan kebijakan terhadap lingkungan Perhubungan
			Belum optimalnya penanganan terhadap keselamatan Lalu-lintas



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018 - 2023 yaitu :

"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Misi Kepala Daerah Kabupaten Klungkung periode 2018 – 2023 yaitu :

- (1). Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya
- (2). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- (3). Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan
- (4). Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dgn menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik
- (5). Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tabel 3.4
Program yang dilaksanakan OPD
sebagai Penjabaran dari Misi yang didukung OPD

No.	Misi Ke	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
1	Misi ke-5 : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	1. Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas. 2. Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung



Tabel 3.5
Penjabaran Visi dan Misi

Visi : "TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi yang didukung : Misi ke-5 Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Program : 1. Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas. 2. Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung	Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas, Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi Laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Kebutuhan anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga emas dan Penetapan Lokasi salah satu pelabuhan setiga emas di Pesinggahan masih bermasalah terkait dengan RTRW Provinsi	Pengajuan proposal pembangunan Pelabuhan segitiga emas baik di Tingkat Provinsi, Pusat maupun dukungan dari sektor swasta membuat trobosan dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan Pelabuhan
	Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan, Rendahnya pengguna angkutan umum di Kabupaten Klungkung dan tingginya angka kecelakaan.	Keterbatasan angkutan umum yang layak, perlu pembaruan angkutan umum	Kerjasama yang baik antara aparaturnya pemerintahan Dishub dengan stakeholder transportasi darat yang baik, lancar dan suasana kerja yang kondusif

Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Maka Tugas pokok Dinas Perhubungan ini mencerminkan misi dari Kepala Daerah yaitu Misi ke-5 dimana terdapat permasalahan pokok yang dihadapi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung pada saat ini yaitu Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.



Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. klungkung
Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan rambu-rambu, traffic light, marka jalan, Guard rail, pemenuhan uji kendaraan dan Bimbingan/sosialisasi ketertiban lalu-lintas belum optimal	Keterbatasan anggaran sebagai penunjang program/kegiatan	Kebijakan yang mendukung dengan adanya patroli/pengamanan Lalu-lintas secara berkala
2	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Pelayanan Kapal Roro KMP. NJA, pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan layanan Kapal jukung/boat di Pelabuhan rakyat belum optimal	Operasional KMP. NJA yang masih 1 kl Trip, belum mencukupi kebutuhan penyeberangan.	Biaya angkutan transportasi masal yang relatif murah, lebih aman, nyaman dan dapat mempermudah mobilitas antar wilayah, Rencana Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas
3	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi	Pelayanan di Terminal Semarapura, dan terminal pengumpan lainnya belum optimal	Belum optimalnya peran dan fungsi Terminal	Kebijakan yang mendukung penataan Terminal dan peningkatan peran fungsi Terminal
4	Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi	Diklat dan Bimbingan teknis untuk peningkatan kualitas SDM belum terlaksana secara berkelanjutan	Masih kurangnya Diklat dan Bimbingan teknis secara berkala	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pejabat dan staf yang menunjang lingkungan kerja yang kondusif
5	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.	Pelayanan dengan transportasi laut yang efektif dan efisien belum optimal	Kapasitas muat Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi yang masih sangat terbatas dan Pelabuhan pendukung belum optimal	Kebijakan yang mendukung perkembangan transportasi laut, salah satunya dengan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas



3.3.2. Telaahan Renstra PD Dishub Provinsi Bali

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dishub Provinsi Bali, maka sasaran pembangunan Jangka menengah Provinsi Bali di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
Berdasarkan Renstra PD Dishub Provinsi Bali Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Dishub Prov. Bali	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi antar wilayah	Pelayanan Kapal Roro KMP. NJA, pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan layanan Kapal jukung/boat di Pelabuhan rakyat belum optimal	Operasional KMP. NJA yang masih 1 kl Trip, belum mencukupi kebutuhan penyeberangan	Biaya angkutan transportasi masal yang relatif murah, lebih aman, nyaman dan dapat mempermudah mobilitas antar wilayah
2	Tersedianya kapasitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi sesuai target <i>demand transport</i>	Kapasitas pelayanan KMP. NJA terbatas dengan 1 kl Trip perhari, tidak sesuai dengan Target <i>demand transport</i>	Belum dimilikinya pelabuhan penyeberangan sendiri di Klungkung daratan.	Kapasitas pelayanan penyeberangan ke Nusa Penida ditunjang dengan angkutan penyeberangan lain Jukung dan Boat. Rencana Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas
3	Meningkatkan standar kelaikan operasional sarana dan prasarana transportasi	Belum adanya Gedung Pengujian dan alat uji mekanis.	Terbatasnya anggaran mengakibatkan pelaksanaan pembangunan Gedung Pengujian terhambat.	Koordinasi yang baik dan komitmen yang tinggi menghasilkan standar uji kendaraan berjalan lancar
4	1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan yang baik (<i>Clean Governance</i>) 2. Meningkatkan pemberdayaan angkutan umum	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum	Terbatasnya kemampuan SDM OPD dan kurangnya sarana prasana penunjang kenyamanan penumpang angkutan umum	Koordinasi yang baik dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin serta meningkatkan fasilitas penunjang bagi angkutan umum



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Klungkung merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang berbentuk kepulauan dengan pulau kecil yang berpenghuni. Kabupaten Klungkung memiliki ekosistem perbukitan, lembah, dataran rendah, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kondisi fisik wilayah seperti itu menyebabkan kabupaten Klungkung terbagi menjadi dua bagian yaitu wilayah Klungkung Daratan dan Wilayah Klungkung Kepulauan.

Potensi Kabupaten Klungkung, selanjutnya telah dituangkan dalam Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berkeadilan dalam Wilayah Klungkung yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI) berlandaskan Tri Hita Karana”. Upaya perwujudan rencana pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Klungkung sebagai matra ruang rencana pembangunan.

Substansi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang-kurangnya telah memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana jaringan prasarana wilayah, terdiri dari :

- 1. Sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama;
- 2. Sistem jaringan prasarana lainnya, mencakup; sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan PD Dinas PerhubunganKab. Klungkung
Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Rencana ruas jalan menuju ke Pelabuhan Penyeberangan	Pelayanan jalan penghubung menuju Pelabuhan Penyeberangan	Keterbatasan anggaran	Koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat dan provinsi Bali



No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Klungkung Daratan diusulkan sebagai jalan K2	Gunaksa belum tersedia		
2	Peningkatan kualitas pelayanan Terminal Kota Semarapura (Terminal Klungkung)	Pelayanan terhadap pengguna jasa Terminal Semarapura, peningkatan peran fungsi Terminal belum optimal	Semakin berkurangnya jumlah angkutan penumpang	Kebijakan pembangunan/ pemeliharaan Terminal Semarapura
3	Pengembangan Terminal Tipe C (Banjarangkan, Dawan dan Sampalan Nusa Penida)	Pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan dan mempermudah akses kendaraan umum belum optimal	Belum terealisasinya pelaksanaan pembangunan Terminal tipe C	Kebijakan yang mendorong pelaksanaan pembangunan Terminal tipe C

Mengacu kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033, maka rencana pengembangan transportasi di Kabupaten Klungkung, yaitu:

1. Pembangunan Sistem jaringan transportasi (pasal 16) terdiri dari:
 - a. sistem jaringan transportasi darat
 - b. sistem jaringan transportasi laut
 - c. sistem jaringan perkeretaapian, dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara
2. Pembangunan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 18), meliputi :
 - a. Terminal angkutan penumpang
 - b. Terminal barang
3. Pembangunan Jaringan penyeberangan (pasal 20) merupakan rangkaian kelanjutan sistem jaringan jalan di Wilayah Klungkung Daratan menuju Wilayah Klungkung Kepulauan yang melintasi perairan Selat Badung, meliputi :
 - (1) Pelabuhan penyeberangan; dan
 - (2) lintas penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

 - a. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida, di Desa Kutampi Kaler dan Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida untuk kapal ferry (ro-ro);
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Klungkung Daratan, di Desa Gunaksa Kecamatan Dawan untuk kapal ferry (ro-ro);
 - c. Rencana pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Batununggul dan Mentigi untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Batununggul Kecamatan Nusa Penida;
 - d. Pelabuhan Tribuana, Kusamba untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kusamba;



- e. Pelabuhan Rakyat Kampung Kusamba untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kampung Kusamba;
- f. Pelabuhan Rakyat Buyuk untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Toyapakeh;
- g. Pelabuhan Rakyat Banjar Nyuh untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Ped;
- h. Pelabuhan Rakyat Jungutbatu untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Jungutbatu;
- i. Pelabuhan Rakyat Tanjung Sangyang untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Lembongan;
- j. Pelabuhan Rakyat Ceningan untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Lembongan; dan
- k. Pelabuhan Rakyat Kutampi Kaler untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang, di Desa Kutampi kaler.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat, provinsi dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat menghubungkan antar wilayah kabupaten, antar kecamatan, antar desa, antar dusun-dusun terpencil, penyeberangan serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan PD Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
Berdasarkan Telaahan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terminal kota tidak berfungsi optimal	Transportasi umum tidak terkelola dengan baik, animo masyarakat menggunakan moda transportasi umum rendah, penataan terminal perlu diperbaiki	Kurangnya Manajemen angkutan umum, Kurangnya penataan pedagang kaki lima	Tren penataan transportasi umum di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten
2	Kecelakaan lalu lintas	Manajemen penyediaan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan perlu ditingkatkan, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerangan jalan dan pemeliharaan jalan, koordinasi dengan instansi terkait mengenai ketertiban berlalu lintas	Disiplin berlalu lintas kurang, besarnya persentase pengendara sepeda motor oleh anak di bawah umur, angkutan umum tidak berfungsi dengan baik	Kesiagaan kepolisian dan Petugas Dinas Perhubungan
3	Sarana prasarana perhubungan darat	Transportasi umum tidak terkelola dengan baik, animo masyarakat menggunakan	Kurangnya minat masyarakat	Kebijakan pengembangan angkutan siswa



No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Kurang memadai	moda transportasi umum rendah, penataan terminal perlu diperbaiki, kurangnya memenuhi fasilitas Lalu-lintas	menggunakan angkutan umum	gratis, dengan melibatkan angkutan Kota yang tersedia
4	Lalu lintas kurang tertib	Sangsi dan penegakan hukum belum memadai, kampanye berlalu lintas yang baik perlu digalakkan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkendara dengan aman	Razia yang sering dilakukan kepolisian dan Dishub
5	Tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas	Pengawasan dan monitoring kurang memadai, manajemen penyediaan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan perlu ditingkatkan, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerangan jalan dan pemeliharaan jalan	Vandalisme, rambu sering terhalang/tertutupi pohon, reklame liar, dll.	Petugas Dishub dan Kepolisian yang disiagakan di berbagai sudut kota
6	Terbatasnya jumlah tenaga sertifikasi pengujian kendaraan bermotor	Pelayanan uji kendaraan terganggu, pengawasan emisi gas buang kendaraan kurang optimal	SOP pengujian kendaraan kadang diabaikan	Sudah tersedia SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
7	Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah kawasan budaya dan wisata serta sentra-sentra industri	Akses jalan ke kawasan wisata Nusa Penida dan pemenuhan fasilitas Lalu-lintas perlu diperbaiki	Keterbatasan anggaran, fasilitas keselamatan belum menjadi prioritas	Pengembangan pariwisata di Nusa Penida yang terus bertumbuh

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam suatu perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa masa mendatang. Apabila isu-isu ini tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu strategis selalu dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang berasal dari lingkungan eksternal baik itu isu kebijakan nasional maupun regional. Di Kabupaten Klungkung isu strategis di Bidang Perhubungan yaitu **Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan**, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya pengguna angkutan umum di Kabupaten Klungkung, Jumlah transportasi umum cenderung stagnan, sedangkan jumlah penumpang umum cenderung berkurang Ini mengindikasikan peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang akan terus membebani infrastruktur transportasi darat. Permasalahan ini berkaitan dengan berkurangnya minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum serta tidak adanya insentif



pengembangan transportasi umum, seperti integrasi antar moda angkutan umum dan subsidi tiket.

2. Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi Laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Transportasi laut juga mengalami kendala pengembangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa depan, baik penumpang lokal maupun wisatawan. Ini berkaitan dengan berbagai permasalahan sebagai berikut:
 - a) Masih kurangnya sarana/prasarana transportasi laut
 - b) Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan penyeberangan (dermaga penyeberangan)
 - c) Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan laut antar pulau (pelabuhan rakyat)

Tabel 3.10
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Klungkung
OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

NO.	ISU STRATEGIS	IDENTIFIKASI PENYEBAB	DASAR PENYUSUNAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Terbatasnya kemampuan infrastruktur transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.	Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan Pembinaan para sopir/ Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
		Masih Tingginya anak di Bawah umur yang menggunakan sepeda motor untuk ke Sekolah	sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020	Penyelenggaraan Angkutan Siswa Gratis di 4 Kecamatan di Kabupaten Klungkung secara bertahap
		Kurang tersedianya angkutan umum yang berkualitas		
		Masih rendahnya kesadaran akan peraturan dan disiplin berlalu-lintas dari masyarakat. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran akan peraturan dan disiplin berlalu-lintas serta penegakan aturan di Bidang LLAJ		Kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada anak sekolah di Kabupaten Klungkung tentang Keselamatan Lalu-lintas. Peningkatan Mutu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
		Masih ada beroperasinya kendaraan yang kurang memenuhi standar keselamatan		



NO.	ISU STRATEGIS	IDENTIFIKASI PENYEBAB	DASAR PENYUSUNAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
		Kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi Laut belum optimal, khususnya di wilayah Nusa Penida	Program ini disusun sebagai penjabaran Program aksi Misi ke 5 RPJMD yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dgn tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas dan Tersedianya hasil kajian airstrip dan tersedianya 2 helipad

Isu Strategis Dinamika Regional yang berkembang di Kabupaten Klungkung, sebagian telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui program unggulan di Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat berupa Jasa Pengoperasian Layanan Angkutan Siswa Gratis di Kabupaten Klungkung

Angkutan sekolah di Kabupaten Klungkung merupakan pelaksanaan kegiatan dari isu strategis yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klungkung mulai tahun 2017 dengan maksud untuk mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Klungkung dari penggunaan sepeda motor yang dilakukan siswa di bawah umur. Dengan adanya angkutan siswa diharapkan dapat memperlancar proses belajar mengajar di sekolah tanpa membahayakan siswa, siswa dapat memanfaatkan fasilitas angkutan tersebut untuk pergi dan pulang dari sekolah dengan tidak dipungut biaya atau gratis. Dimana Tujuan diadakan angkutan siswa adalah :

- 1) Menyediakan layanan Angkutan Siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan yaitu :
 - dapat diandalkan dalam arti asal tujuan dan rute trayek tetap terjadwal, aman, nyaman dan selamat.
 - berkualitas dalam arti sarana angkutan dan awak kendaraan laik operasi sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.
 - berkesinambungan dalam arti operasional layanan angkutan kepada siswa dapat terus dilaksanakan sesuai SPM yang ditetapkan walaupun tahun anggaran telah berakhir.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan peran angkutan umum dalam rangka mendukung pembangunan yang memberikan kenyamanan dan keamanan menuju Kabupaten Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.

2. Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut berupa Pembangunan Pelabuhan “Segitiga Emas”

Transportasi penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, dan mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, serta diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur. Kriteria lintas penyeberangan meliputi menghubungkan jaringan jalan yang terputus



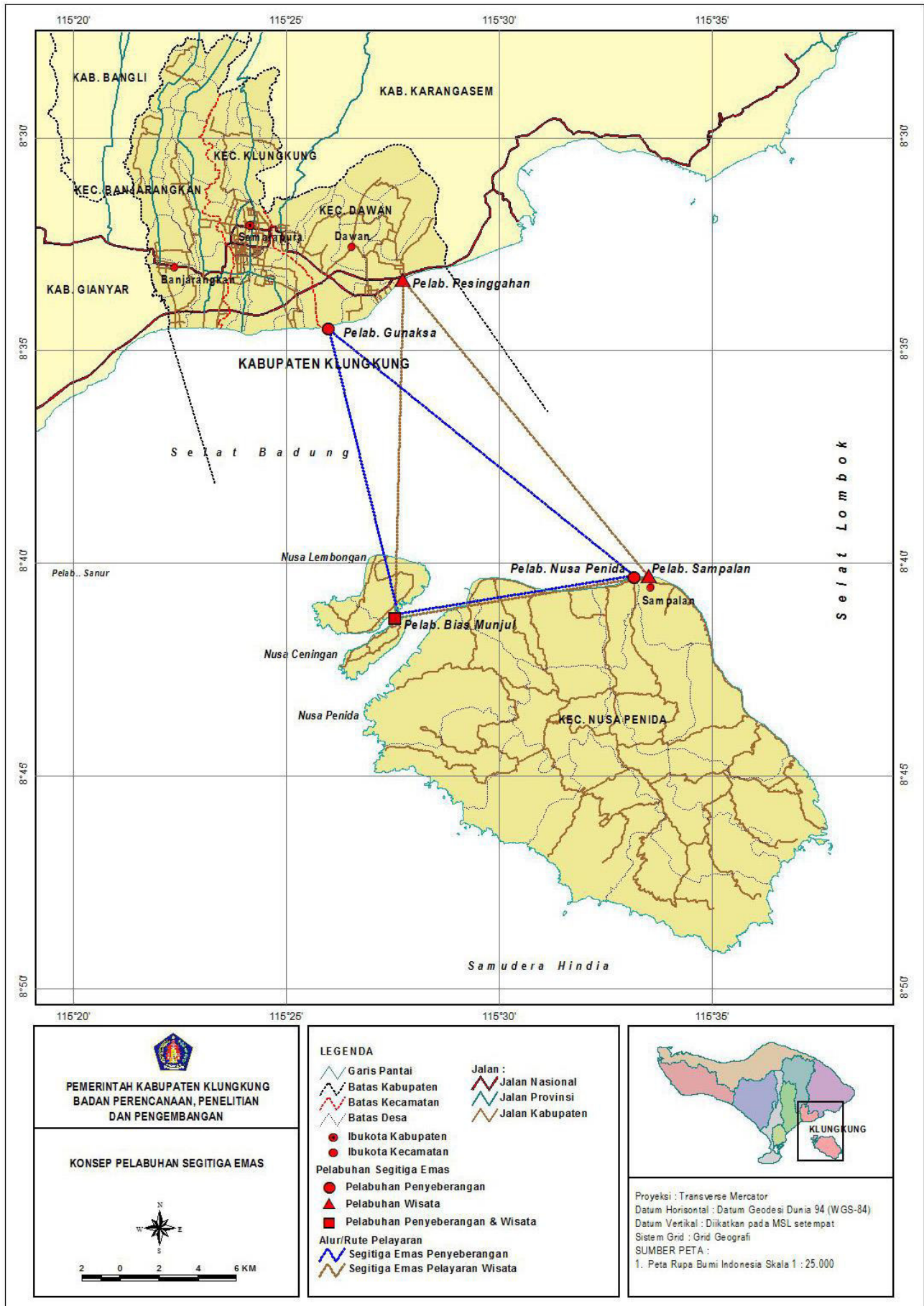
oleh laut, selat dan teluk, melayani lintas dengan tetap dan teratur, berfungsi sebagai jembatan bergerak, menghubungkan antara dua pelabuhan dan tidak mengangkut barang lepas.

Pelabuhan “**Segitiga Emas**” merupakan istilah yang digagas oleh Bupati Klungkung dalam upaya memperkuat konektivitas Klungkung kepulauan (Nusa Penida) dengan Klungkung daratan dan meningkatkan aksesibilitas transportasi laut Kecamatan Nusa Penida melalui pembangunan prasarana pelabuhan yang representatif.

Pembangunan pelabuhan “segitiga emas” Kabupaten Klungkung dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di Nusa Penida dibandingkan Klungkung daratan sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat ditekan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas Kecamatan Nusa Penida.

Pembangunan pelabuhan “segitiga emas” sebagaimana **Gambar**, meliputi :

- 1) Segitiga jaringan angkutan penyeberangan kapal ferry yaitu Pelabuhan Gunaksa – Pelabuhan Nusa Penida – Pelabuhan Bias Munjul untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran distribusi logistik dan barang-barang konstruksi.
- 2) Segitiga jaringan angkutan wisata/penumpang yaitu Pelabuhan Pesinggahan – Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Bias Munjul (dalam hal ini Pelabuhan Bias Munjul didisain untuk pelayanan angkutan penyeberangan dan angkutan laut). Tujuannya untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran arus penumpang termasuk wisatawan.



Gambar .3.2
Konsep Pelabuhan Segitiga Emas



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memasuki pembangunan Kabupaten Klungkung pada periode lima tahun (2018-2023), Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai perangkat daerah Kabupaten Klungkung dan sebagai salah satu pelaku pembangunan Kabupaten Klungkung yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi Kabupaten Klungkung yaitu :

"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Klungkung pada periode 2018-2023. Rakyat Klungkung yang Unggul dan Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kecukupan lahir dan batin masyarakat Klungkung.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan (enabling conditions) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung. Misi Kabupaten Klungkung dirumuskan sebagai "PANCA SANTI" yang diimplementasikan dalam inovasi program aksi GEMA SANTI, yang terdiri dari 5 misi yang terdiri dari :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukan kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan



produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, dituntut untuk mampu merefleksikan Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung 2018-2023, melalui penetapan Tujuan dan Sasaran kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah apa yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung yang akan diwujudkan di Bidang Perhubungan masuk dalam Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup”.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, dimana Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan yang telah diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut :



Tabel. 4.1
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
dalam Urusan Perhubungan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi Awal 2018	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir (%)
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Darat Th. } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Th. } (n-1)} \times 100\%$	454.220 orang	4	10	5	5	5	29
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	$\frac{\sum \text{Penumpang Angk. Laut Th. } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Th. } (n-1)} \times 100\%$	2.226.214 orang	5	5	5	5	5	25

Tujuan dan sasaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung selaras dan mendukung Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung juga mendukung Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keselarasan Hubungan antara Tujuan Sasaran RPJMD
dan Tujuan Sasaran OPD dalam Bidang Perhubungan

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan
Sasaran RPJMD	Sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)



Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Urusan Perhubungan
Dalam Renstra Perangkat Daerah Dishub Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET (%)					ALASAN/PENJELASAN
			20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	4	10	5	5	5	Peningkatan penggunaangkutan umum merupakan indikator meningkatnya layanan transportasi baik dari sisi keselamatan, kenyamanan maupun akses. Cara pengukuran : $\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } (n-1)} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	5	5	5	5	5	$\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } (n-1)} \times 100\%$



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Strategi dan Kebijakan OPD yang akan dicapai berdasarkan rumusan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan dan sasaran Pembangunan dalam RPJMD
Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera			
Misi :			
Misi ke- 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup			
Tujuan RPJMD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas	Kebijakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas Kecamatan Nusa Penida
		Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan	Kebijakan memberikan kemudahan akses anak SMP bersekolah, penurunan angka kecelakaan Lalu-lintas dan pemberdayaan angkutan darat



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat dengan Program utama Mengembangkan angkutan siswa gratis di di 4 Kecamatan di Kab. Klungkung	▪ Kegiatan Angkutan Siswa Gratis untuk Anak SMP di Kabupaten Klungkung, dengan memberdayakan angkutan umum yang ada di Kabupaten Klungkung ▪ Target Pelaksanaan pada 4 Kecamatan dilaksanakan secara bertahap yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida dalam kurun waktu 2018-2023 ▪ Meningkatkan kualitas angkutan umum dengan Pembinaan para sopir/ Juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang ▪ Kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada anak sekolah di Kabupaten Klungkung tentang Keselamatan Lalu-lintas. ▪ Peningkatan Mutu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai faktor penunjang keselamatan Lalu-lintas ▪ Pemenuhan fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Klungkung. ▪ Pemenuhan Rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Klungkung ▪ Pemenuhan Fasilitas Lalu-lintas penunjang keselamatan Lalu-lintas di wilayah Kabupaten Klungkung.
		Meningkatkan Pelayanan Transportasi Laut dengan Program utama Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas	Pembangunan pelabuhan “segitiga emas”, meliputi : 1. Segitiga jaringan angkutan penyeberangan kapal ferry yaitu Pelabuhan Gunaksa – Pelabuhan Nusa Penida – Pelabuhan Bias Munjul untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran distribusi logistik dan barang-barang konstruksi. 2. Segitiga jaringan angkutan wisata/penumpang yaitu Pelabuhan Posinggahan – Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Bias Munjul (dalam hal ini Pelabuhan Bias Munjul didesain untuk pelayanan angkutan penyeberangan dan angkutan laut). Tujuannya untuk memperkuat konektivitas dan kelancaran arus penumpang termasuk wisatawan



Tabel 5.3
Arah Kebijakan Dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 1 Kecamatan Klungkung	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 1 Kecamatan Klungkung	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 1 Kecamatan Klungkung	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 3 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan)	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 4 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan dan Nusa Penida)
Penetapan lokasi di Kemenhub untuk pelabuhan Bias Munjul dan Sampalan, Rekomendasi ijin lingkungan pelabuhan Sampalan dan Bias Munjul dari Gubernur Bali, Review DED Sampalan	Pembangunan Pelabuhan Sampalan, Penyusunan DED pelabuhan Bias Munjul	Rekomendasi penetapan Lokasi pelabuhan Pesinggahan dari Kemenhub, DED pelabuhan Pesinggahan, rekomendasi ijin lingkungan pelabuhan Pesinggahan dari Gubernur Bali, Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul	Pembangunan pelabuhan pesinggahan dan Lanjutan pembangunan Pelabuhan Bias Munjul	Pengembangan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung

Arah Kebijakan Dalam Renstra Dishub Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 1 Kecamatan Klungkung	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 3 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan)	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 3 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan)	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 4 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan dan Nusa Penida)	Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 4 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan dan Nusa Penida)
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pelabuhan Segitiga Emas : • Studi Kelayakan Pelabuhan Mentigi • Masterplan dan DED Pelabuhan Sampalan/mentigi • Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bias Munjul • UKL/UPL Pelabuhan Bias Munjul	1. Pembangunan Pelabuhan Sampalan (53 M) 2. Penyusunan Masterplan dan DED pelabuhan Bias Munjul	1. DED dan RIP pelabuhan Pesinggahan (Kusamba) 2. Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul (59,95) 3. Rekomendasi ijin lingkungan pelabuhan Pesinggahan dari Gubernur Bali. 4. Rekomendasi penetapan Lokasi pelabuhan Pesinggahan dari Kemenhub.	1. Pembangunan pelabuhan pesinggahan (Kusamba) (79,9 M) 2. Lanjutan pembangunan Pelabuhan Bias Munjul	1. Operasional Pelabuhan Mentigi. 2. Operasional Pelabuhan Bias Munjul 3. Operasional Pelabuhan Kusamba 4. Pengembangan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan, maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif (yang bersifat umum) yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung, Anggaran dan Belanja Provinsi Bali, Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau bantuan lainnya/hibah.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program tahunan. Kegiatan didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Sama halnya dengan sasaran, kegiatan juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Kode Rekening				Program / Kegiatan
1				2
2	09	09		Program Pelayanan Kesekretariatan
2	09	09	01	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2	09	09	02	Pelayanan Administraasi Kepegawaian
2	09	09	03	Pengelolaan Kearsipan
2	09	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
2	09	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
2	09	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2	09	15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan



Kode Rekening				Program / Kegiatan
1				2
2	09	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan
2	09	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida
2	09	15	14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida
2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2	09	17	18	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
2	09	17	21	Kegiatan Pelaksanaan uji Petik Kendaraan Bermotor
2	09	17	22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas
2	09	19	06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2	09	19	09	Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran lalu-lintas
2	09	19	10	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas Lalu-lintas
2	09	25		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2	09	25	01	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2	09	25	02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan
2	09	25	03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Ca pain pada Tahun Awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung-Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan		Dishub				23.151.564.774,08		21.320.781.378,87		69.820.097.608,48		94.647.793.478,08		75.677.188.705		284.617.425.944,51	Dishub	Klik
		9	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0	17,5	1.234.877.849,00	18	1.294.543.884,00	18,5	1.282.109.627,00	19	1.326.624.283,00	20	1.421.979.176,00	20	6.560.134.819	Dishub	Klik
		09.01	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	75	80	979.512.992,00	85	1.004.694.360,00	90	976.246.168,00	95	1.001.746.168,00	100	1.046.746.168,00	100	5.008.945.856	Dishub	Klik
		09.02	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin aparatur (%)	85	90	110.638.000,00	95	124.898.456,00	100	132.238.000,00	100	136.738.000,00	100	154.738.000,00	100	659.250.456	Dishub	Klik
		09.03	Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	80	85	18.371.500,00	90	22.122.132,00	95	22.871.500,00	98	24.871.500,00	100	42.871.500,00	100	131.108.132	Dishub	Klik
		09.04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	8	9	72.140.475,00	9	76.923.454,00	9	78.717.263,00	9	84.227.471,00	9	84.677.471,00	53	396.686.134	Dishub	Klik
		09.05	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (lap)	23	23	30.398.882,00	23	30.467.882,00	23	31.992.208,00	23	34.992.208,00	23	44.492.208,00	23	172.343.388	Dishub	Klik
		09.06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (lap)	12	12	23.816.000,00	12	35.437.600,00	12	40.044.488,00	12	44.048.936,00	12	48.453.829,00	12	191.800.853	Dishub	Klik
		15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan (%)	25	30	1.729.645.116,00	45	2.350.673.779,00	75	40.348.996.107,48	95	59.492.245.643,08	100	39.968.532.439,00	100	143.890.093.084,56	Dishub	Klik
		15.01	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	25	35	16.826.900,00	50	556.595.000,00	80	314.034.900,00	95	58.645.000,00	100	64.509.500,00	100	1.010.611.300	Dishub	Klik



		15.03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	25	30	235.989.000,00	50	241.524.900	75	37.992.420.483,48	95	56.774.367.578,08	100	36.635.928.300,00	100	131.880.230.261,56	Dishub	Klik
		15.12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Peningkatan mutu operasional /pengoperasian prasarana perhubungan (%)	30	35	354.257.720,00	40	316.874.396,00	70	716.923.403,00	85	1.238.615.744,00	100	1.762.477.318,00	100	4.389.148.581	Dishub	Klik
		15.13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan (%)	50	50	960.458.246,00	70	1.235.679.483,00	80	1.325.617.321,00	90	1.420.617.321,00	100	1.505.617.321,00	100	5.649.644.696	Dishub	Klik
		15.14	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	100	100	162.113.250,00												
		17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load Faktor Angkutan Darat (%)	60	70	11.326.334.709,08	75	9.183.078.623,87	75	19.271.734.156,00	80	24.308.623.456,00	80	24.333.623.456,00	80	88.423.394.400,95	Dishub	Klik
				Load Faktor Angkutan Laut (%)	75	83,4		85		87		88		90		90			
		17.18	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	50	60	71.505.000,00	70	7.189.414.756,00	80	7.118.424.392,00	90	7.128.424.392,00	100	7.143.424.392,00	100	28.651.192.932	Dishub	Klik
		17.21	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	100	100	218.675.064,00	100	391.573.160,00	100	246.550.064,00	100	256.550.064,00	100	266.550.064,00	100	1.379.898.416	Dishub	Klik
				Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100	100		100		100		100		100	100	100			
		17.22	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek	Persentase layanan angkutan darat dalam trayek yang laik operasi (%)	50	60	11.036.154.645,08	70	1.602.090.707,87	80	11.906.759.700,00	90	16.923.649.000,00	100	16.923.649.000,00	100	58.392.303.052,95	Dishub	Klik
		19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas	Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)	50	50	8.362.341.000,00	48	7.988.645.792,00	46	8.233.784.820,00	44	8.584.934.820,00	42	8.833.784.820,00	42	42.003.491.252	Dishub	Klik
		19.06	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pemenuhan pengadaan dan pengawasan Lalu-lintas (%)	50	60	579.751.800,00	70	653.624.432,00	80	609.921.460,00	90	654.471.460,00	100	609.921.460,00	100	3.107.690.612	Dishub	Klik
		19.09	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	20	35	22.524.000,00	50	28.929.000,00	70	30.179.000,00	95	30.179.000,00	100	30.179.000,00	100	141.990.000	Dishub	Klik



		19.10	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-lintas	Tersedianya perencanaan dan pemenuhan Perlengkapan jalan (%)	50	60	7.760.065.200,00	70	7.306.092.360,00	80	7.593.684.360,00	90	7.900.284.360,00	100	8.193.684.360,00	100	38.753.810.640	Dishub	Klik
		25	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan Angka Kecelakaan (30%)	42	40	498.366.100,00	37	503.839.300,00	33	683.472.898,00	30	935.365.276,00	25	1.119.268.814,00	25	3.740.312.388	Dishub	Klik
		25.01	Kegiatan Koordinasi Dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	1	1	240.831.400,00	2	342.617.400,00	3	550.600.000,00	4	760.875.000,00	5	900.356.000,00	5	2.795.279.800	Dishub	Klik
		25.02	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Persentase penyusunan kebijakan Norma, standar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan	25	35	94.215.500,00	50	67.363.700,00	70	50.689.000,00	95	75.869.598,00	100	100.568.000,00	100	388.705.798	Dishub	Klik
		25.03	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan jasa Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan (%)	50	60	163.319.200,00	70	93.858.200,00	80	82.183.898,00	90	98.620.678,00	100	118.344.814,00	100	556.326.790	Dishub	Klik



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung merupakan perangkat daerah yang khusus menangani Bidang Urusan Perhubungan, dimana Tujuan dan Saran RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan di Bidang Perhubungan masuk dalam Misi ke 5 yaitu **Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup**, Dimana Tujuan dan Sasaran dalam Bidang Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel.7.1
Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan
Urusan Perhubungan dalam RPJMD dan Renstra OPD

Tujuan RPJMD	Tujuan OPD
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan
Sasaran RPJMD	Sasaran OPD
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan
Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran OPD
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%)
Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif.

Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut harus memenuhi kriteria : *spesifik dan jelas; dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias*.

Indikator Kinerja Utama adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran utama Perangkat Daerah. Dalam rangka peningkatan kinerja serta



lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing.

Tujuan Penetapan IKU :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Pemilihan dan penetapan IKU Dinas Perhubungan mempertimbangkan beberapa hal sbb :

1. Dokumen RPJM/D, Renstra, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang Kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kiner Utama perangkat daerah Dinas Perhubungan berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dan telah ditetapkan, IKU tersebut berlaku untuk Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, Dalam IKU Dinas Perhubungan telah ditentukan target dari tahun 2019 sampai dengan 2023 berikut cara penghitungannya, Tabel IKU Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALASAN/PENJELASAN
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan	Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Darat	4	10	5	5	5	Peningkatan penggunaangkutan umum merupakan indikator meningkatnya layanan transportasi baik dari sisi keselamatan, kenyamanan maupun akses. Cara pengukuran : $\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Darat Tahun } (n-1)} \times 100\%$
		Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut	5	5	5	5	5	$\frac{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } n - (n-1)}{\sum \text{Penumpang Angkutan Laut Tahun } (n-1)} \times 100\%$



BAB VIII

PENUTUP

Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi sekarang ini. Untuk itu agar dapat menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung harus dapat mewujudkan tujuan serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas perhubungan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Untuk itu diperlukan suatu Pedoman Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis dan strategis, sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu kepada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Klungkung dan RPJMD Kabupaten Klungkung.

Peran penting Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 antara lain adalah :

- a. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Salah satu isi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung ini adalah berisi uraian tentang rencana/program kegiatan Dinas Perhubungan untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung setiap tahunnya.
- b. Merupakan penguatan peran para pengambil keputusan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung. Dengan adanya rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang telah dirumuskan dalam Renstra maka para pengambil kebijakan dapat semakin mantap dalam rangka memutuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik secara langsung maupun secara bertahap.
- c. Merupakan dasar evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung setiap tahun dan lima tahunan. Melalui rencana kerja yang terprogram dan terstruktur setiap tahunnya, maka kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung akan dapat di evaluasi, baik dalam jangka waktu setiap tahun maupun setiap lima tahun. Evaluasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung dengan rencana kerja yang telah disampaikan dalam Renstra.
- d. Merupakan dasar pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Setelah dilakukan evaluasi kinerja oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung, baik tahunan maupun lima tahunan, maka renstra dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung tersebut akan dilaporkan kepada Bupati



Klungkung sebagai laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Dinas Perhubungan telah berkomitmen kuat untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan selama 5 tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Serta dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan masyarakat pada umumnya serta kepentingan pengguna jasa transportasi khususnya.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA



LAMPIRAN

4. Tabel Target & Pagu Indikatif Program / Kegiatan

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V					
							Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
2	09	09		Program Pelayanan Kesekretariatan	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)	0,00 persen`	17,50	1.234.877.849,00		18,00	1.294.543.884,00		18,50	1.282.109.627,00		19,00	1.326.624.283,00		20,00	1.421.979.176,00		20,00	6.560.134.819,00	Sekretaris
2	09	09	01	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	75,00 Persen	80,00	979.512.992,00	Dishub	85,00	1.004.694.360,00	Dishub	90,00	976.246.168,00	Dishub	95,00	1.001.746.168,00	Dishub	100,00	1.046.746.168,00	Dishub	100,00	5.008.945.856,00	Sekretaris
2	09	09	02	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian disiplin aparatur (%)	85,00 Persen	90,00	110.638.000,00	Dishub	95,00	124.898.456,00	Dishub	100,00	132.238.000,00	Dishub	100,00	136.738.000,00	Dishub	100,00	154.738.000,00	Dishub	100,00	659.250.456,00	Sekretaris
2	09	09	03	Pengelolaan Kearsipan	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)	80,00 Persen	85,00	18.371.500,00	Dishub	90,00	22.122.132,00	Dishub	95,00	22.871.500,00	Dishub	98,00	24.871.500,00	Dishub	100,00	42.871.500,00	Dishub	100,00	131.108.132,00	Sekretaris
2	09	09	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	8,00 dok	9,00	72.140.475,00	Dishub	9,00	76.923.454,00	Dishub	9,00	78.717.263,00	Dishub	9,00	84.227.471,00	Dishub	9,00	84.677.471,00	Dishub	53,00	396.686.134,00	Sekretaris
2	09	09	05	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja terkirim tepat waktu (lap)	23,00 lap	23,00	30.398.882,00	Dishub	23,00	30.467.882,00	Dishub	23,00	31.992.208,00	Dishub	23,00	34.992.208,00	Dishub	23,00	44.492.208,00	Dishub	138,00	172.343.388,00	Sekretaris
2	09	09	06	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (lap)	12,00 lap	12,00	23.816.000,00	Dishub	12,00	35.437.600,00	Dishub	12,00	40.044.488,00	Dishub	12,00	44.048.936,00	Dishub	12,00	48.453.829,00	Dishub	72,00	191.800.853,00	Sekretaris
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan (%)	25,00 %	30,00	1.729.645.116,00		45,00	2.350.673.779,00		75,00	40.348.996.107,48		95,00	59.492.245.643,08		100,00	39.968.532.439,00		100,00	143.890.093.084,56	Kepala Bidang Prasarana
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	25,00 Persen	35,00	16.826.900,00	Dishub	50,00	556.595.000,00	Dishub	80,00	314.034.900,00	Dishub	95,00	58.645.000,00	Dishub	100,00	64.509.500,00	Dishub	100,00	1.010.611.300,00	Kepala Bidang Prasarana
2	09	15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas Perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	25,00 Persen	30,00	235.989.000,00	Dishub	50,00	241.524.900,00	Dishub	75,00	37.992.420.483,48	Dishub	95,00	56.774.367.578,08	Dishub	100,00	36.635.928.300,00	Dishub	100,00	131.880.230.261,56	Kepala Bidang Prasarana
2	09	15	12	Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian prasarana Perhubungan (%)	30,00 persen	35,00	354.257.720,00	Dishub	40,00	316.874.396,00	Dishub	70,00	716.923.403,00	Dishub	85,00	1.238.615.744,00	Dishub	100,00	1.762.477.318,00	Dishub	100,00	4.389.148.581,00	Kepala Bidang Prasarana
2	09	15	13	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida	Peningkatan mutu operasional/pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan (%)	50,00 Persen	50,00	960.458.246,00	Dishub	0,00	1.042.144.427,00	Dishub	0,00	1.131.504.071,00	Dishub	0,00	1.211.504.071,00	Dishub	0,00	1.281.504.071,00	Dishub	50,00	5.627.114.886,00	Kepala Bidang Prasarana

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V					
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
2091514	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida	Cakupan Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai standar (%)	50,00 Persen	60,00	162.113.250,00	Dishub	70,00	193.535.056,00	Dishub	80,00	194.113.250,00	Dishub	90,00	209.113.250,00	Dishub	100,00	224.113.250,00	Dishub	100,00	982.988.056,00	Kepala Bidang Prasarana
20917	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Load faktor angkutan darat (%)	60,00 persen	70,00	11.326.334.709,08		75,00	9.183.078.623,87		75,00	19.271.734.156,00		80,00	24.308.623.456,00		80,00	24.333.623.456,00		80,00	88.423.394.400,95	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
		Load faktor angkutan laut (%)	75,00 persen	83,37			85,00			87,00			88,00			90,00			90,00		
2091712	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	50,00 persen	60,00	71.505.000,00	Dishub	70,00	7.189.414.756,00	Dishub	80,00	7.118.424.392,00	Dishub	90,00	7.128.424.392,00	Dishub	100,00	7.143.424.392,00	Dishub	100,00	28.651.192.932,00	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
2091721	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	100,00 Persen	100,00	218.675.064,00	Dishub	100,00	391.573.160,00	Dishub	100,00	246.550.064,00	Dishub	100,00	256.550.064,00	Dishub	100,00	266.550.064,00	Dishub	100,00	1.379.898.416,00	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
		Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	100,00 Persen	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00			100,00		
2091722	Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek	Persentase layanan angkutan darat dalam trayek yang laik operasi (%)	50,00 Persen	60,00	11.036.154.645,08	Dishub	70,00	1.602.090.707,87	Dishub	80,00	11.906.759.700,00	Dishub	90,00	16.923.649.000,00	Dishub	100,00	16.923.649.000,00	Dishub	100,00	58.392.303.052,95	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana
20919	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Derajat Kejenuhan Lalu-lintas (%)	50,00 Persen	50,00	8.362.341.000,00		48,00	7.988.645.792,00		46,00	8.233.784.820,00		44,00	8.584.934.820,00		42,00	8.833.784.820,00		42,00	42.003.491.252,00	Kepala Bidang Lalu-lintas
2091906	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Pemenuhan Pengendalian dan Pengawasan Lalu-lintas (%)	50,00 Persen	60,00	579.751.800,00	Dishub	70,00	653.624.432,00	Dishub	80,00	609.921.460,00	Dishub	90,00	654.471.460,00	Dishub	100,00	609.921.460,00	Dishub	100,00	3.107.690.612,00	Kepala Bidang Lalu-Lintas
2091909	Kegiatan Analisa Dampak Lalu-lintas Terhadap Kelancaran Lalu-lintas	Rekomendasi analisa dampak Lalu-lintas yang ditindaklanjuti (%)	20,00 Persen	35,00	22.524.000,00	Dishub	50,00	28.929.000,00	Dishub	70,00	30.179.000,00	Dishub	95,00	30.179.000,00	Dishub	100,00	30.179.000,00	Dishub	100,00	141.990.000,00	Kepala Bidang Lalu-Lintas
2091910	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas	Tersedianya Perencanaan dan Pemenuhan Perlengkapan Jalan (%)	50,00 Persen	60,00	7.760.065.200,00	Dishub	70,00	7.306.092.360,00	Dishub	80,00	7.593.684.360,00	Dishub	90,00	7.900.284.360,00	Dishub	100,00	8.193.684.360,00	Dishub	100,00	38.753.810.640,00	Kepala Bidang Lalu-Lintas
20925	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penurunan angka kecelakaan (%)	42,00 Persen	40,00	498.366.100,00		37,00	503.839.300,00		33,00	683.472.898,00		30,00	935.365.276,00		25,00	1.119.268.814,00		25,00	3.740.312.388,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
2092501	Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inovasi teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	1,00 inovasi	1,00	240.831.400,00	Dishub	2,00	342.617.400,00	Dishub	3,00	550.600.000,00	Dishub	4,00	760.875.000,00	Dishub	5,00	900.356.000,00	Dishub	5,00	2.795.279.800,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
2092502	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan Perhubungan	Persentase penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur bidang lingkungan	25,00 Persen	35,00	94.215.500,00	Dishub	50,00	67.363.700,00	dishub	70,00	50.689.000,00	dishub	95,00	75.869.598,00	Dishub	100,00	100.568.000,00	Dishub	100,00	388.705.798,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
				Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V					
				Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
2092503	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan	50,00 Persen	60,00	163.319.200,00	Dishub	70,00	93.858.200,00	Dishub	80,00	82.183.898,00	Dishub	90,00	98.620.678,00	Dishub	100,00	118.344.814,00	Dishub	100,00	556.326.790,00	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
TOTAL				23.151.564.774,08			21.320.781.378,87			69.820.097.608,48			94.647.793.478,08			75.677.188.705			284.617.425.944,51		

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG															
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG															
↓															
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Transportasi Perhubungan Indikator : Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan darat (%) Persentase Peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)															
↓															
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Perhubungan Indikator : Presentase peningkatan Penumpang Angkutan Darat (%) Presentase peningkatan Penumpang Angkutan Laut (%)															
↓															
Kepala Bidang Lalu-lintas			Kepala Bidang Angkutan dan Sarana			Sekretaris			Kepala Bidang Prasarana			Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan			
Sasaran : Menurunnya Kemacetan Lalu-lintas Indikator : Derajat kejenuhan Lalu-lintas (%)			Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Indikator : Load Faktor Angkutan Darat (%) Load Faktor Angkutan Laut (%)			Sasaran : Terlaksananya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indikator : Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%)			Sasaran : Tersedianya prasarana Transportasi Perhubungan sesuai standar Indikator : Terpenuhinya prasarana Perhubungan yang sesuai standar dan peningkatan mutu operasional prasarana Perhubungan (%)			Sasaran : Menurunnya angka kecelakaan Lalu-lintas Indikator : Penurunan Angka Kecelakaan (%)			
↓			↓			↓			↓			↓			
Seksi Manajemen Lalu-lintas	Seksi Rekayasa lalu-lintas Jalan	Seksi Analisa Dampak Lalu-lintas	Seksi Angkutan Darat	Seksi Angkutan Laut	Seksi Pengujian Sarana	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Seksi Perencanaan	Seksi Pembangunan Prasarana	Seksi Pengoperasian Prasarana	UPTD, Pengelolaan Prasarana Tenis Perhubungan di Kec. Nusa Penida	Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Seksi Lingkungan Perhubungan	Seksi Keselamatan
Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran :	Sasaran :	Sasaran :
Tersedianya perencanaan manajemen Lalu-lintas	Terpenuhinya kebutuhan Rekayasa Lalu-lintas	Ditindaklanjutinya rekomendasi analisis dampak Lalu lintas	Meningkatnya Pelayanan Angkutan darat	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Laut	Meningkatnya angkutan umum yang laik operasi	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Terpenuhinya kebutuhan perencanaan prasarana Perhubungan	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Perhubungan sesuai standar	Beroperasinya prasarana Perhubungan sesuai standar	Terlaksananya pengelolaan prasarana Teknis Perhubungan di Nusa Penida	Diterapkannya Inovasi Teknologi Perhubungan	Meningkatnya kerjasama pihak ketiga dalam penurunan angka kecelakaan	Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil audit keselamatan
						Tertatanya arsip di Lingkungan Perangkat Daerah		Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah							
						Meningkatnya disiplin aparatur									
Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :	Indikator :
Tersedianya perencanaan dan pemenuhan Perlengkasan jalan (%)	Pemenuhan pengendalian dan pengawasan jalan (%)	Rekomendasi analisa dampak Lalu lintas yang ditindaklanjuti (%)	Persentase layanan angkutan darat dalam trayek yang laik operasi (%)	Persentase layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	Persentase angkutan darat yang laik jalan (%)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu (lap)	Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu (dok)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan sesuai dengan standar yang berlaku (%)	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan yang sesuai dengan standar yang berlaku (%)	Peningkatan mutu operasional /pengoperasian prasarana perhubungan (%)	Cakupan pengelolaan prasarana teknis Perhubungan di Nusa Penida yang sesuai dengan standar (%)	Inovasi Teknologi Perhubungan yang dilaksanakan (inovasi)	Persentase penyusunan kebijakan Norma, standar dan prosedur bidang lingkungan Perhubungan	Persentase sosialisasi keselamatan yang dilaksanakan (%)
					Persentase angkutan laut yang laik jalan (%)	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi (%)		Laporan kinerja terkirim tepat waktu (lap)							
						Capaian Disiplin aparatur (%)									

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

